

Mekanisme Dua Wajah Kekuasaan Terhadap Ideologi 212 (Studi Kasus Demokrasi Wajah Partai Pilgub Jakarta Dan Aksi Bela Islam 212)

¹Siti Nurjanah

¹Mahasiswa Doktoral Studi Agama-Agama Kosentrasi Agama dan Politik
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kota Badung, Indonesia.
Email: sitinurjannah591@gmail.com

Abstract. *The two-face mechanism that originated from the 212 Islamic defense action movement in the country. The so-called two faces, namely religion and political parties of government, have the power to defend the country because of blasphemy by political figures. The act of defending Islam was carried out because of the dissemination of a video from a figure of Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) by issuing the contents of a verse from the Qur'an surah Al-Maidah 51. He called for any religion other than Islam to be made a leader and that the clerics had been deemed a lie by ahok. The purpose of this study is to analyze and understand how political games are developed on the mechanism of the face of power against ideology 212 especially in the case of the 2019 gubernatorial election party democracy and the 212 Islamic defense action. The method used with descriptive analytical research methods, methods are compiled based on an overview related to the analysis of power within the ideology of political parties and Islamic groups.*

The result of this study is the mechanism of political parties and Islamic groups against the ideology of 212 which is shaded by clerical figures by providing motivational intake to the public to follow up on the desecration of Qur'anic verses. The mechanism is based on the steps of interpreting by forming a drive from the MUI. If the cleric has given an opinion and decision regarding blasphemy and must be tried, the government must also participate in that opinion. That means the majority of religious groups are still proportional to the political power in the country's governing chamber. As for the ethics of Islamic parties and groups in the ideology of Islamic defense action 212 is grown because the country must come out of polemics of misrepresentation, misleading and outside government rules. Ethics is concerned with morals. The goal is to maintain religious unity in Indonesia.

In conclusion, because of the emergence of blasphemy, seeds of disillusionment with other religions have emerged accusing each other and justifying what is going on. The latter relates to the role and function of Islamic religious parties and groups towards the 212 Islamic defense action, as we know the blasphemy problem resulted from the dissemination of videos in 2016 and resurfaced in 2019 where the year was in the heat of the governorship election. Many of the parties and religious groups even beyond that played their part so that the dispute became big. The time parameter from the upload of the video to the governor's election is five years, and it shouldn't have reaped polemics. However, because in 2019 a new election was held in Jakarta, a lot of people used the object as a political game, and flocked to appreciate the public to join and give a function in speaking out.

Keywords: *Political Parties, Islamic Groups, Defending Action 212 and Political Power*

PENDAHULUAN

Mekanisme dua wajah yang berawal dari gerakan aksi bela Islam 212 di Indonesia. Yang disebut dua wajah yaitu agama dan politik pemerintahan, yang memiliki power untuk membela negara karena terjadinya penistaan agama oleh tokoh politik. Aksi bela Islam dilakukan penyebaran video dari seorang tokoh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang pada saat itu tepatnya September tanggal 27 tahun 2016 menjabat sebagai Gubernur non aktif di DKI Jakarta, dan sekarang ia menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pertamina. Saat itu Ahok berpasangan dengan Jokowi Dodo Gubernur dan Wakil Gubernur, kemudian ketika Jokowi maju sebagai calon presiden Ahok menggantikan Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dari permasalahan Ahok membangkitkan para jamaat muslim untuk menindaklanjuti perilaku dari penistaan tersebut. Terjadilah demo dan memberikan sanksi berupa hukuman yang membuat Ahok masuk penjara. Peristiwa tersebut menandakan bahwa agama sangat kuat di dalam kekuasaan negara khususnya Islam yang memayoritasi negara. Sehingga negara harus bisa menengahi perilaku penistaan tersebut yang masuk pada undang-undang ITE, Pasal 27 Ayat 3 UU ITE. Agamapun harus memiliki mekanisme terhadap tindakan yang dilakukan, apakah adanya penistaan tersebut harus dilakukan dengan demo atau dapat diredam oleh diskusi. Namun ternyata umat muslim pada saat itu sepakat lebih menginginkan Ahok untuk masuk penjara. Keseriusan dari pencemaran video tersebut semakin merembet ke arah kampanye PILGUB DKI Jakarta yang dilakukan pada tahun 2017, pada saat itu Ahok dipasangkan dengan Djarot Saiful Hidayat, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, dan Agus Harimurti Yudhoyono dan Sylviana Murni.

Adanya kampanye menjadi sebuah power yang sangat berpengaruh bagi setiap calon, sehingga biografi kehidupan harus dijaga untuk keamanan pemilihan. Dari sini kita bisa melihat bahwa ada kekuasaan pada mekanisme demokrasi disetiap partai untuk mempromosikan dan memperkuat untuk menjadi penguasa. Guna menjadi penguasa memiliki hak lebih banyak dari partai yang tidak berkuasa, mendapatkan kursi, memiliki hal bersuara, menentukan keputusan tanpa adanya penekanan dari luar. Permasalahannya, ketika kekuasaan itu disalahgunakan maka akan terbentuk sebuah penolakan dari luar partai sehingga memunculkan pemberontakan baru. Dan setelah itu Indonesia akan terus saling menyalahkan.

Penelitian ini dilakukan karena untuk mengungkap ideologi 212 dengan cara melihat mekanisme kelompok partai dan kelompok Islam dalam memahami kekuasaan politik. Oleh sebab itu penelitian ini disuguhkan kepada para pembaca agar teliti dalam memahami suatu aksi yang bertujuan membenarkan apa yang salah dan menyalahkan apa yang sepatutnya salah. Karena apabila tidak dikaji dengan baik mengenai kekuasaan politik maka ada kemungkinan kita masuk jurang perminan kotor politik tersebut. Dengan demikian peneliti memberikan judul untuk penelitian ini Mekanisme Dua Wajah Kekuasaan Terhadap Ideologi 212 (Studi Kasus Demokrasi Wajah Partai Pilgub Jakarta Dan Aksi Bela Islam 212). Ideologi murni terkait kekuasaan telah terkotori oleh rasa hasrat yang tidak seharusnya disentuh. Sehingga dapat berakibat ketidakstabilan dalam ruang sosial-politik dan menimbulkan banyak sekali polemik-polimik terkait Agama.

Perumusan Masalah pada penelitian ini yaitu; 1. Bagaimana mekanisme partai politik dan kelompok Islam dalam kekuasaan politik Indonesia? 2. Bagaimana etika partai dan kelompok Islam dalam membangun kekuasaan politik terhadap ideologi aksi bela Islam 212? 3. Bagaimana peran fungsinya dalam sinergi suara kekuasaan yang terhubung dengan masyarakat atas bela aksi 212?

Tujuan Masalah Penelitian, penelitian ini bertujuan sebagai berikut; 1) untuk memahami mekanisme partai dan kelompok Islam dalam kekuasaan politik Indonesia; 2) menelaah etika partai politik dan kelompok Islam membangun kekuasaan di dalam ideologi aksi bela Islam 212; 3) menganalisis sejauh mana peran dan fungsi Islam terkait suara kekuasaan terhadap masyarakat.

Penelitian Terdahulu terkait sebagai bahan pertimbangan peneliti yaitu Nabil Lintang Pamungkas, Agung Widiyantoro, Moddie Alvianto Wicaksono. *Judul artikel Relasi Politik dan Isu Agama: Dinamika Politik PKS dan Aksi Bela Islam Pada Pemilu Serentak 2019. Jurnal Sosial Politik.. Vol 6 No 2 (2020), hlm 70-84.* Isi penelitian ini penggunaan isu agama sebagai objek politik dalam momen tertentu untuk pemilihan umum. Sehingga menjadi faktor pendukung terjadinya polarisasi masyarakat dan memperngaruhi subyektivitas pemilih dalam menentukan perwakilan aspirasinya. Fokus penelitian ini pada partai Keadilan Sejahtera (PKS) terhadap bela aksi Islam, sebagai gerakan mengangkat isu penistaan agama dan kriminalisasi Ulama. Tujuan dari penelitian ini menganalisis potensi PKS menggunakan isu agama sebagai instrumen politik dalam memperoleh dukungan dan memperkuat pemilihan umum (Nabil, 2019).

Selanjutnya perbedaan penelitian ini terkait bagaimana mekanisme kekuasaan pada partai politik dan agama Islam (kelompok Islam) dalam aksi bela Islam 212. Peneliti membaca bahwa ada ideologi dalam pembentukan kelompok partai dan Islam dalam ranah kekuasaan politik yang dibungkus ke dalam suara aksi bela damai 212. Gerakan tersebut memiliki kekuatan bagi para pengguna politik untuk memberikan peran dan fungsi bagi masyarakat. Tujuan penelitian tersebut mengupas bagaimana metode dari partai dan kelompok Islam dalam membangun kontruksi gerakan 212. Sehingga undang-undang dan keputusan harus dikeluarkan secara adil dan bijaksana dalam kasus bela aksi Islam 212.

Kerangka Berpikir

M Quraish Sihab merupakan salah satu tokoh ulama yang berasal dari Indonesia, ia meraih gelar Strata 1 di Al-Azhar Khairo dengan jurusan Tafsir dan hadis. Adapun meneruskan pendidikannya sampai meraih gelar doktor. Judul disertasi penelitiannya yaitu *Nazhm Al-Durar li Al-Baqa'iy Tahqiq qa Dirasah* dengan yudisium *Cum Laude* (Hamid, 2021). Quraish Sihab menafsirkan ilmu sosial yang terdapat di dalam kandungan ayat kitab suci Al-Qur'an. Untuk mengartikan hubungan sosial dilakukan atas perintah dari kalam Allah yaitu melakukan perdamaian antara dua kelompok orang beriman, ikatan tersebut perlu diterapkan kepada umatnya yang beriman, karena pada dasarnya hubungan manusia itu bersaudara. Adapun untuk mencegah adanya goncangan masalah maka setiap orang yang mengetahui apa yang salah dan benar harus memberikan peringatan dengan etika tatakruma pergaulan dengan menerapkan prinsip dasar hubungan antar manusia (Hamid, 2021).

Manusia menurut Quraish Sihab memiliki totalitas di dalam jiwa dan raga. Yang diulang disetiap kata di Al-Qur'an sebanyak 65 kali, istilah manusia dibentuk tiga konteks yaitu; 1) *insan* dihubungkan dengan keistimewaan sebagai khalifah yang memikul beban amanah; 2) *insan* dihubungkan dengan predisposisi negatif pada dirinya; 3) penciptaan manusia yang berasal dari kata *insan* (Roswati, 2013).

Kondisi sosial terjadi karena adanya beberapa faktor, yaitu faktor dari psikologis dan budaya. Kondisi sosial selain dari faktor interal, faktor eksternal (dari luar) mempengaruhi kehidupan pribadi yaitu dengan bergerak melalui relasi dengan cukup kuat. Momen relasi tersebut dapat mempengaruhi pengambilan sikap daripada realitas sosial yang ada, akhirnya keputusan yang didapat tidak murni dalam dirinya (Ramli, 2018).

Bentuk sistem sosial dibagi menjadi beberapa bagian yaitu, struktur masyarakat, etika dan moralitas, perintah pemimpin

1. Struktur masyarakat

Struktur masyarakat dijelaskan sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk mengurus urusan kaum muslimim. Yang terdiri dari struktur pemerintahan atau para penguasa, ulama terdapat di dalam kelompok sesuai profesi. Quraish Sihab berpendapat bahwa mereka meliputi lembaga atau badan secara perorangan yang masing-masing diantara mereka memiliki keberwenangan yang sah untuk memerintah pada bidang masing-masing pada kelompok. Adapun prinsip menjadi pokok yang merhubungan dengan masyarakat yaitu harus patuh pada pemimpin, meskipun ada rasa ketidaksukaan. Patuh di sini berarti taat (tunduk) menerima secara tulus serta menemani tujuan dari pimpinan. Taat bukan berarti hanya melaksanakan yang diperintahkan, melainkan ikut juga dalam partisipasi upaya untuk melakukan tugas penguasa sebagai dukungan usaha dalam pengabdian terhadap masyarakat. Karena masyarakat melihat partisipasi yang dilakukan oleh kelompok menghasilkan pandangan sebagai dukungan positif yang termasuk kontrol sosial demi kesuksesnya tugas dan emban yang diberikan lembaga (Anwar, 2012).

2. Etika dan Moralitas

Quraish Sihab mencegah ketimpangan pada masyarakat dengan menumbuhkan aspek akidah dan etika dalam jiwa pemeluknya. Ia memberikan metode pendidikan yang dimulai pada jiwa setiap pribadi seseorang, keluarga, dan masyarakat sehingga pada akhirnya menciptakan hubungan serasi antar semua anggota masyarakat. Ia memberikan landasan-landasan etika sebagai prinsip yaitu; a. Asas manfaat, di mana tidak membahayakan bagi siapapun; b. Prioritas, mengutamakan kemaslahatan manusia; c. Mengurangi kemudaratannya dibanding mendantangkan masalah; d. Sesama manusia harus saling menghormati.

Ia menjelaskan terkait orientasi sosial dengan beberapa makna yaitu; 1. Nilai yang memiliki sifat mendasar, umum, dan abadi; 2. Terdapat konsep maupun aturan yang sifatnya lokal, temporal dan praktis (Tafsir, 2014). Seorang muslim harus memiliki akhlak atau prinsip yang mengatur perilaku dirinya. Dari prinsip merujuk pada tugas dan tanggung jawab selain syari'ah dan ajaran Islam secara umum. Adapula seorang muslim harus memiliki adab,

dengan menjadi unggul dan utama dalam kesempurnaan akhlak yang mulia (Abd. Muid, 2020).

3. Peran pimpinan

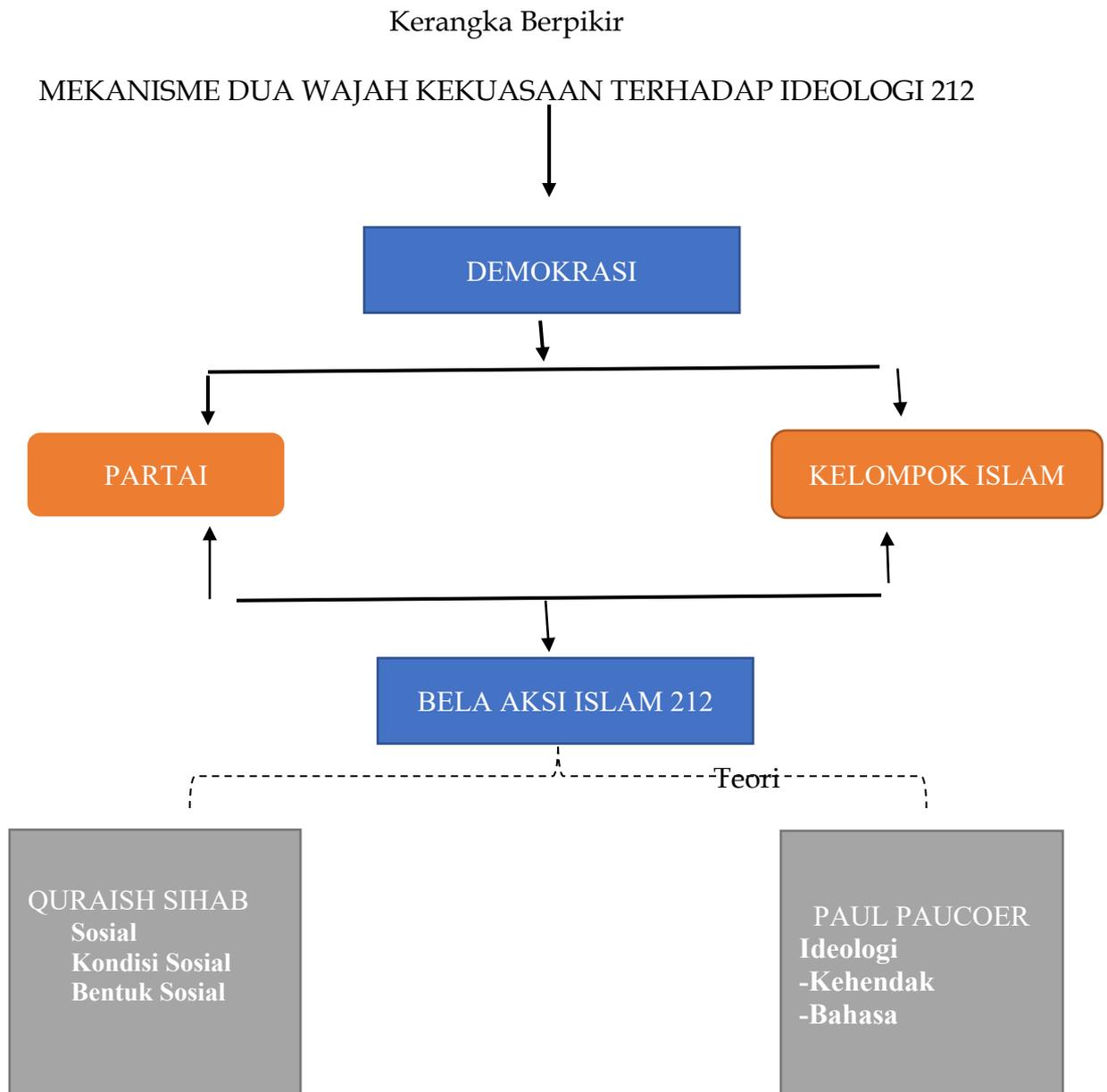
Pemimpin diartikan sebagai penguasa yang membawa kelompok pada tujuan dengan memikul tanggung jawab yang besar. Seorang pemimpin agar sukses menjalankan tugasnya dengan beberapa sifat dan sikap yaitu; 1. Lemah lembut; 2. Pemaaf; 3. Bermusyawarah; 4. Memiliki hubungan vertikal dengan Tuhan. Sifat dan sikap tersebut harus dipertahankan dengan komitmen tidak boleh dilepaskan oleh pemimpin. Karena kekuatan pemimpin ada karena anugrah dari Allah yang diperoleh dengan suatu perjanjian antara penguasa dan Tuhannya (Taryudi, 2021).

Masyarakat wajib untuk taat pada pemimpin, suka atau tidak ketika seorang menjabat sebagai pemimpin artinya masyarakat harus taat (tunduk) menerima secara tulus dengan mebersamai tujuan lembaga. Ketaatan yang dimaksud di sini bukan hanya melaksanakan perintah pimpinan, tetapi ikut berpartisipasi dalam upaya yang dilakukan oleh penguasa atas dasar dukungan usaha-usaha pengabdian kepada masyarakat. Partisipasi tersebut dukungan dengan positif khususnya melakukan kontrol sosial demi terlaksana tugas yang mereka bebani (Mujahidin,).

Teori kedua yaitu Paul Ricoeur isinya terkait fungsi ideology yang dijelaskan sebagai berikut;

Menurut Paul ideology dari manusia memiliki tiga persoalan diungkapkan melalui eksistensinya yaitu; yang dikhendaki, yang tidak dikhendaki, keberhinaan dan kebersalahan dan kejahatan. Adapun dari tindakan manusia memiliki dimensi yang afektif yaitu; Persoalan atau tindakan dengan adanya motif, hasrat mausapun keinginan dan kesakitan serta kesenangan. Persoalan tersebut dibungkus dalam perspektif fenomenologis dengan menghubungkan proses kesadaran subyektif (Masykur, 2015).

Ideologi bahasa menurut Paul menjelaskan kejahatan menggunakan metode hermeneutika bersangkutan terkait simbol dan berbagai mitos. Bahasa sebagai syarat utama pada manusia, untuk mengungkapkan dirinya, sehingga manusia memahami sesuatu melalui bahasa (Wahid,



GAMBAR 1. Kerangka Berpikir Mekanisme Kekuasaan

METODE

Metode penelitian kualitatif deskriptif-analisis, Literatur
Pendekatan Fenomenologi oleh Rudan dolf Otto dan Sosiologi Emile Durkheim

1. Pendekatan fenomenologi → memahami symbol, kepercayaan atau ritual menurut yang mereka pahami
2. Pendekatan Sosiologi Durkheim:
 - a. Fakta sosial → yaitu 'hal yang

dilakukan dengan paksaan di luar individu dari cara bertindak, yang bebas ataupun tidak, hal tersebut dikarenakan sudah meliputi di dalam masyarakat sekaligus dapat memiliki eksistensi sendiri dari manifestasi pada individu'.

b. Kolektif → kolektifitas yang

dikategorikan dalam dua bentuk yaitu berdasarkan kesadaran yang terdapat pada dirinya sendiri, dan kesadaran yang terdapat di luar dapat digambarkan kesadaran tersebut dari suatu kelompok masyarakat. Kesadaran pada diri sendiri harus diarahkan dengan dibantu oleh kelompok masyarakat. Karena nilai dari solidaritas di dalam kelompok sangat penting, ketika individu dan masyarakat saling membutuhkan satu sama lain dan saling ketergantungan. Kondisi masyarakat tergantung dari perkumpulan individu sendiri, ketika para tokoh penting saling memahami dan menerapkan nilai norma yang berlaku maka semua anggota akan mengikuti apa yang sudah diputuskan, hal tersebut karena begitu pentingnya orang yang memegang kendali pada masyarakat (Daniel, 2012).

c. Solidaritas → diartikan dengan

kesatuan dari individu yang masuk dalam suatu masyarakat yang saling memperikat antara relasi individu satu dengan individu lainnya. Nama lain dari solidaritas sosial yaitu integrasi sosial yang berfokus pada koordinasi pada individu di dalam sistem sosial.

d. Fungsional → bahwa masyarakat

sebagai suatu sistem yang memiliki sub-sub sistem dimana sistem tersebut mempunyai fungsi untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat, fungsional membantu menuliskan peraturan pada perundangan yang dibuat berdasarkan teori fungsional struktur yang bertujuan untuk bisa mencapai tujuan pada tatanan struktur sosial yang teratur.

Teknik pengumpulan data dengan Jenis data yaitu *non-probability* merupakan pengambilan sampel dengan cara sistematis atau tidak adanya peluang sama bagi setiap anggota populasi untuk dijadikan sampel. Sehingga populasi tersebut dapat ditentukan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai kemampuan sampel. Sumber Data yaitu sumber data sekunder dan primer. Sumber data primer teknik secara pustaka dalam jurnal-jurnal yang berkaitan dengan partai dan kelompok agama Islam dalam kekuasaan politik. Sumber data sekunder dilakukan secara tidak langsung yang merujuk pada artikel, dokumen, video, dan lain sebagainya (Sugiyono, 2018).

Teknik Analisis Data dengan mereduksi data lebih terperinci terkait mekanisme partai politik dan kelompok Islam dalam kekuasaan pada ideologi aksi bela Islam 212, penyajian data yaitu penyusunan menjadi terorganisir dengan uraian singkat terkait demokrasi partai politik pilgun dan bela aksi 212 pada kelompok agama, dan verifikasi data yaitu menyimpulkan terkait peran dan fungsi partai dan kelompok Islam dalam mengembangkan tujuan dan instansi agar menjadi kuat dan memberikan bantuan kepada masyarakat (Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Partai Politik dan Kelompok Islam Indonesia

Partai dan kelompok Islam pasti memiliki cara untuk mengungkapkan seberapa kuat dan lama kedua kelompok tersebut bertahan. Kita dapat melihat dari mekanisme-mekanisme yang digunakan untuk membangun kinerja di dalam partai dan kelompok Islam, sebagai wadah bagi masyarakat serta keamanan yang mendamaikan dunia. Mekanisme pun dapat memperlihatkan bagaimana partai dan kelompok Islam mempengaruhi pemerintahan dengan kekuatan suara dari masing-masing kelompok tersebut. Untuk menganggungkan suara maka partai dan kelompok harus dapat gebrekan yang dipengaruhi juga oleh masyarakat, karna suara masyarakat sangat berpengaruh bagi keduanya.

Ada beberapa sistem yang dipakai dalam politik indonesia yaitu

1. Interaksi yang digambarkan dengan totalitas dari perilaku sosial yang diterapkan pada nilai-nilai terhadap masyarakat maupun pemerintahan indonesia. Berupa landasan rohani bangsa, idologi politik, doktrin nilai, falsafah negara dan sistem nilai-nilai lainnya.
2. Sistem politik memiliki kepentingan di dalamnya melalui proses yang ditentukan oleh suatu tujuan. Fungsi adanya tujuan untuk menyusun skala prioritas dan keputusan dengan beberapa seleksi.
3. Sistem akan berjalan apabila sudah diberlakukan di negara Indonesia, baik dari prosesnya secara utuh ataupun sebagian.
4. Sistem politik ini berjalan sesuai dengan fungsi dari mekanisme sebagai dasar negara, ketentuannya disetujui oleh konstitusional juga diperhitungkan pada tingkat lingkungan masyarakat secara nyata.

Sistem politik pasti dipengaruhi oleh setiap faktor lingkungan seperti faktor pada sosial budaya, lingkungan, ekonomi di suatu negara dan lainnya. Dampak dari faktor tersebut membentuk perilaku politik pada masyarakat dan negara, dari dilihat dari pemegang kekuasaan maupun dikendalikan oleh yang dikuasai. Menurut David Easton sistem politik ditentukan oleh kenyataan pada interaksi masyarakat dan hubungan dengan penyebaran nilai secara otoritatif dalam masyarakat (Sahya, 2015).

a. Fungsi Sistem Penyeleksian Politik

Penyeleksian politik merupakan fungsi seleksi pada rakyat untuk melaksanakan urusan pengelolaan negara. Seleksi tersebut dilakukan dengan cara pemilihan dan pengangkatan seseorang untuk mengisi peran tertentu di dalam sistem sosial berdasarkan kedudukan, suku, kelahiran, sifar, prestasi, kombinasi atau sebagainya. Tujuan dari adanya penyeleksian yaitu terpilihnya pemimpin pemerintahan negara dari asal tingkat pusat hingga tingkat terbawah sesuai dengan kriteria yang telah disepakati (Anggara, 2015).

Fokus objek penyeleksiannya kepada masyarakat, alasannya karena masyarakat memiliki hal dan kewajiban mejadi objek politik, dengan berdasarkan UUD 1945 dan peraturan undang-undang lainnya tanpa membedakan SARA, maupun memiliki kedudukan yang sama. Akan tetapi penyeleksian tersebut pasti memiliki kriteria yang harus dipenuhi.

Mekanisme dalam menyeleksi politik dengan beberapa cara yaitu; 1. Pemilihan umum, dilakukan oleh setiap warga negara yang memenuhi persyaratan dari UUD 1945; 2. Uji kelayakan dan kepatutan bertujuannya untuk

memilih pimpinan eksekutif yang akan memimpin lembaga tertentu (lembaga tinggi negara dan lembaga pemilik otoritas) yang besar bagi kesejahteraan; 3. Seleksi CPNS, dilakukan setiap institusi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI. Hasil dari seleksi tersebut untuk mengisi formasi yang kosong di dalam birokrasi pemerintahan Indonesia. Fungsi seleksi tersebut untuk memberi pelayanan kepada masyarakat umum dan memiliki status kepegawaian yang tetap (Anggara, 2015).

b. Proses Mekanisme Politik

Cara proses dari politik memiliki perubahan yang signifikan, dengan sejarah yang dinamis dan demokrasi negara Indonesia memiliki beberapa sistem maupun cara yaitu;

Demokrasi Liberal, demokrasi melalui maklumat pemerintah, mekanisme ini memiliki sistem multipartai yang menampakkan sifatnya instabilitas politik setelah berlakunya parlementer dalam naungan UUD 1945. Demokrasi liberal tidak bertahan lama sampai tahun 1959, yang dilanjutkan demokrasi terpimpin dilaksanakan melalui pidato presiden di depan konstitusi 10 November 1956. Ada beberapa proses yang mewarnai demokrasi liberal yaitu; 1. Penyaluran tuntutan, 2. Pemeliharaan dan kontinuitas nilai, 3. Kapabilitas, 4. Integrasi vertikal, 5. Integrasi horizontal, 6. Gaya politik, 7. Kepemimpinan, 8. Perimbangan partisipasi politik dengan kelembagaan, 9. Tingkat stabilitas (Anggara, 2015).

Demokrasi Secara Terpimpin, dikembangkan oleh bangsa Barat yang ditinggalkan di Indonesia. Karena pada saat itu presiden Soekarno memimpin RI dengan menerapkan demokrasi liberal namun tidak sesuai dengan bangsa Indonesia, sehingga membentuk pemungutan prosedur suara dalam lembaga perwakilan rakyat juga dinyatakan tidak efektif. Kemudian, memperkenalkan musyawarah untuk mufakat. Karena ketidakstabilan tersebut tokoh politik menjadi penyebab adanya inefektivitas karena didorong ke arah bentuk fragmentaris.

Demokrasi Secara Pancasila, sistemnya tidak menyeluruh karena masih berjalan dan terus berproses. Demokrasi ini berupaya untuk mencari format yang sesuai dengan demokrasi Pancasila. Karena masih berkembang dan berubah, sehingga belum membentuk hasil yang optimal (Anggara, 2015).

Dari mekanisme di atas kelompok Islam harus bisa menggunakan hak dan tanggung jawabnya dalam membenarkan. Sehingga tanggungan tersebut terbentuk menjadi sebuah jihad politik Amar Ma'ruf, Nahi Munkar (perintah berbuat baik dan larangan untuk berbuat jahat). Jangan sampai sebagai kelompok muslim yang memainkan politik terlibat dalam perilaku yang jahat, memporakporandakan apa yang bukan hal pribadi. Itu sebabnya kelompok Islam maupun kelompok lembaga agama lain dapat menguasai kekuasaan perpolitikan dan menyumbang ajaran yang sudah diterapkan secara khusus di dalam lembaga.

Hadirnya kekuasaan politik untuk memberikan pertolongan keadilan kehidupan bagi rakyat yang membutuhkan fungsi tersebut. Tak saja memberikan pertolongan melainkan mengatur skema dalam sebuah partai politik dan agama dalam memainkan peran di dalam kekuasaan. Banyak sekali partai politik dan kelompok agama yang ada di Indonesia seperti PDIP (Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan), GOLKAR (Golongan Karya), GERINDRA (Gerakan Indonesia Raya), PKB (Partai Kebangkitan Bangsa), Partai Nasdem, GELORA (Gelombang Rakyat Indonesia), PKN (Partai Kebangkitan Nusantara), PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PAN (Partai Amanat Nasional), Partai Demokrat, PSI (Partai Solidaritas Indonesia), GARUDA (Garda Perubahan Indonesia), HANURA (Hati Nurani Rakyat), PBB (Partai Bulan Bintang), Partai Buruh, PERINDO (Partai Persatuan Indonesia), PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan partai lainnya. Adapun agama di Indonesia yaitu Kristen Protestan, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Khonghucu, Tao, dan lain sebagainya. Di dalam agama pun ada kelompok-kelompok keagamaan (lembaga Agama) yaitu MUI (Majelis Ulama Indonesia), PGI (Persekutuan Gereja Indonesia), KWI (Konferensi Wali Gereja Indonesia) dalam agama Katolik, PHDI (Parisada Hindu Dharma Indonesia).

Masuk pada lembaga Islam yang terlibat aksi yaitu FPI (Front Pembela Islam), GNPf-MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI), NU (Nahdlatul Ulama), Muhammadiyah. Dan ada kemungkinan diluar kelompok Islam ikut berpartisipasi dalam membela aksi 212 tersebut.

Permasalahan konflik yang terjadi pada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena adanya perbedaan keyakinan atau agama. Sehingga jika pemaknaan ayat suci pada Al-Qur'an dipakai oleh non muslim, pasti terasa terlecehkan oleh logika. Ahok yang berkeyakinan kristen katolik tidak seharusnya menerjemahkan arti dari ayat suci Al-Qur'an, yang dalam ajaran agama Islam bahwa haram bagi orang kafir memegang Al-Qur'an.

Mekanisme untuk melakukan demonstrasi tidak semena-mena tetap harus memiliki aturan. Gerakan ini dilakukan terutama perintah pimpinan Ulama yang lebih besar dan kuat suaranya. Pimpinan ulama apabila sudah memerintah tidak bisa diganggu kuat atau ditolak oleh siapapun, al hasil pemerintahpun harus bersikap lebih bijaksana dalam memutuskan keadilan bagi siapapun. Hakim harus berada di tengah-tengah agar tidak berat sebelah dalam menegak keadilan, entah itu pimpinan ulama maupun seorang tokoh politik Indonesia. Bela Aksi Islam telah menghasilkan beberapa point terkait gerakan sosial yang dibentuk dalam peran ideologi partai dan pimpinan ulama yaitu hadirnya 212 telah mejadi antitesis dari gerakan sosial lainnya, dengan menemph jalan kekerasan untuk perjuangan pada tuntutan yang diajukan, adanya tindakan kekerasan seakan menjadi fenomena dari gerakan sosial menyeru sampai media nasional bahkan internasional. Aksi Bela Islam 212 seolah telah berada di pase gurun pasir. *Point kedua*, aksi 212 dipimpin oleh beberapa ulama serta da'i muda yang ikut serta mereka berasal dari latar belakang ormas Islam *non-mainstream*, suatu fenomena yang menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran kelompok orientasi keberagamaan di dalam umat Islam khususnya Indonesia, karena selama ini diletakan sebagai umat Islam yang moderat dengan mengikuti garis kebijakan ormas *mainstream* seperti NU dan Muhammadiyah. *point ketiga*, aksi bela Islam 212, terjadi adanya transformasi gerakan karena sebelumnya sudah menempuh pada gerakan parlemen ke gerakan lebih terlembaga sebagai institusi sosial dan perekonomian. *Point keempat*, secara kuantitas aksi tersebut telah melibatkan peserta yang sangat banyak, sehingga memunculkan *new fenomena* dalam gerakan sosial. *Point kelima*, aksi bela 212 menjadi rupa dari perkembangan teori sosial. Hasil dari gerakan 212 tidak menghancurkan kekuasaan rezim dan tuntutan

mereka terealisasi oleh hakim persidangan. Yang unik pada gerakan ini bukannya merdup justru semakin menguat entah itu di dalam pola gerakannya maupun ideologinya, bahkan sampai menggeliat terinsitusionalisasi di dalam lembaga sosial, ekonomi maupun politiknya (Gili, 2019).

2. Etika Partai dan Kelompok Islam dalam Ideologi Aksi Bela Islam 212

Pengertian etika yang dijelaskan oleh William I Sauser, Jr yaitu perbuatan yang berasal dari perilaku di dalam masyarakat terkait dengan nilai moral, dimana perilaku seseorang diukur dengan standar masyarakat dalam mengukur etika seseorang. Etika merupakan pola perilaku atau kebiasaan baik dan dapat diterima di lingkungan masyarakat maupun pergaulan organisasi atau kelompok. Menurut Solomon dasar etika merujuk pada dua perbedaan yaitu disiplin ilmu mempelajari terkait nilai-nilai yang dianut manusia berdasarkan pembenaran dari cabang filsafat dan etika yaitu pokok permasalahan disiplin ilmu yang berasal dari nilai hidup dan hukum untuk mengatur tingkah manusia. Hal tersebut dapat dibentuk dengan moral, artinya moral menaruh perkenaan pada setiap karakter dan sifat yang spontan (Robi, 2021).

Etika dan moral berasal dari nilai dalam masyarakat dengan tujuan untuk menjalin hubungan atau ikatan bersama, merawat kesatuan, mewujudkan kehidupan yang sejahtera, harmonis, tentran dan jauh dari kata problem. Etika dan moral tentu saja tidak diterapkan dalam masyarkat saja, melainkan di dalam politik dan pemerintahan negara termasuk kekuasaan kelompok Islam. Etika dan moral telah tercatat di Pancasila, UUD 1945, bahkan Bhinneka Tunggal Ika. Melalui catatan dasar negara ini, pendiri bangsa menggariskan prinsip dasar secara etis bagaimana cara bernegara dan berbangsa dengan visioner dan jelas. Dalam Islam pun moral dan etika menjadi ajaran untuk mencakup berbag dimensi kehidupan yaitu; dimensi ibadah, akidah, muamalah sampai politik (Rusdi, 2022).

Fungsi dalam politik terbatas karena penyediaan pemikiran teoritis untuk memperatanyakan dan menjelaskan secara legitimasi politik secara rasional, argumentatif, objektif dan bertanggung jawab. Tugas dari etika politik yaitu membantu agar pembahasan masalah terkait ideologi dapat dijalankan secara objektif berdasarkan argumen sehingga dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua pihak. etika politik dapat memberikan batasan orientasi secara normatif. Adapun fungsi etika politik fungsinya sebagai sarana kritik ideologi (bukan negara dan hukum) berupa paham dan strategi legitimasi berdasarkan penyelenggaraan negara. Etika dapat membantu masyarakat untuk memahami ideologi negara kepada realitas politik secara nyata. Contoh merefleksikan hakikat keadilan sosial, dengan cara khusus untuk menangani kekuasaan sesuai martabat manusia (Runi, 2003).

Ada enam prinsip-prinsip etika yaitu; 1. Prinsip keindahan; 2. Prinsip persamaan; 3. Prinsip kebaikan; 4. Prinsip keadilan; 5. Prinsip kebebasan; 6. Prinsip kebenaran. Keenam prisnsip tersebut guna untuk mengatur nilai-nilai moral kepada prilaku kelompok atau perorangan terkait mana yang benar dan yang salah (Kurniawan, 2021).

Etika dapat dijelaskan secara teoritis yaitu; etika deskritif adalah ilustrasi atau gambaran tentang tindakan manusia ditinjau dari nilai baik dan buruk serta,

hal mana yang boleh dilakukan dengan etis yang dianut masyarakat. Dan etika normatif, yaitu mengkaji ukuran baik dan buruknya tingkah laku seseorang, yang dibagi menjadi beberapa macam yaitu; etika umum, berhubungan dengan kondisi manusia untuk bertindak etis dalam mengambil kebijakan berdasarkan prinsip moral. Dan ada etika khusus terdiri dari etika sosial, etika individu dan terapan.

Tidak saja mengartikan tentang etika melainkan moral juga harus dipahami secara netral agar tidak terbalik. Moral merupakan cara hidup atau kebiasaan. Secara istilah moral sama dengan istilah namun yang dibedakannya dalam praktek moral. Moral berasal dari dorongan batin seseorang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dapat dilandasi kelompok maupun organisasi agar bisa membedakan mana yang patut dan tidak. Menurut Rachel memberikan definisi bahwa moral merupakan usaha untuk membimbing tindakan seseorang dengan akal terhadap tindakan apa yang menurutnya baik seraya akalnya memberi bobot yang sama menyangkut kepentingan setiap individu (Kurniawan, 2021).

Aksi Bela Islam menyatukan umat Islam dari berbagai kelompok seperti organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Mujahidin, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Dzikir, Persis, LDII dan ormas lainnya. Akan tetapi ormas yang lebih menonjol dalam demonstrasi 212 tersebut dari ormas HTI dan FPI yang pemimpin gerakan tersebut oleh Habib Rizieq, padahal Said Aqil sebagai ketua Umum NU sudah menghimbau untuk tidak terlibat dalam aksi 212, kepada warga NU. Namun penanaman nilai solidaritas ulama-ulama kepada masyarakat tertanam sangat kuat sehingga masyarakat seolah tergiring untuk menunjukkan rasa solidaritas dan motivasi yang tinggi bagi menegakan syariat Islam, yang kemudian Ahok tetap akan dimaafkan sesuai keadilan yang berlaku (Sauki, 2020). Kasus penistaan Ahok juga telah memberikan peluang kepada calon pilihan gubernur pada saat itu yaitu Anies Baswedan bersama wakilnya Sandiaga Uno, dan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Sylviana serta partai yang mendukung calon-calon tersebut ikut terlibat dalam kasus tersebut.

Kemunculan aksi tersebut disebabkan media masa seperti elektronik, internet dan tulisan menjadi kekuatan bagi orang-orang elit yang berperan besar untuk membentuk realitas. Media membungkus konsep-konsep peristiwa ke dalam bentuk realitas sosial. Karena kita ketahui masyarakat Indonesia sangat sensitif dengan berbau SARA maka sangat mudah untuk menyebarkan api kepada mereka. Alhasil dengan penyebaran berita tersebut menarik masyarakat untuk ikut berperan aksi pembelaan agama, karena dasarnya masyarakat sentimen sehingga mudah terprovokasi isu penistaan agama yang disampaikan oleh Ahok tersebut, dengan menyampaikan makna surat Al-Maidah ayat 51 (Saauki, 2020).

3. Peran Dan Fungsi Partai dan Kelompok Agama Islam Terhadap Aksi Bela Islam 212

Fungsional yang dipaparkan oleh Durkheim, ia melihat bahwa masyarakat sebagai suatu sistem yang memiliki sub-sub sistem dimana sistem tersebut mempunyai fungsi untuk mencapai keseimbangan dalam masyarakat, Waters (1994). Perkembangan dan pengaruh dari teori ini sangat berskala luas dalam institusi dan struktur Sosial pada masyarakat, hingga teori ini dinilai sangat ekstrim karena semuanya dianggap fungsional. Apabila timbulnya suatu konflik

maka teori dari fungsional ini dapat memusatkan perhatiannya terhadap masalah dan bisa memecahkan permasalahannya hingga keseimbangan didapatkan oleh masyarakat. Karena fungsional membantu menuliskan peraturan pada perundangan yang dibuat berdasarkan teori fungsional struktur yang bertujuan untuk bisa mencapai tujuan pada tatanan struktur Sosial yang teratur (Nur Malik,).

Lembaga akan memperlihatkan fungsi yang akan mengawasi tindakan dari individu, karena lembaga memang memiliki tujuan dan fungsi untuk memberikan kebutuhan pada individu, berupa pendidikan, memberikan nilai-nilai sehingga masyarakat atau individu tetap pada jalannya, meeratkan hubungan antar individu dan masyarakat, dan lain sebagainya. Adanya lembaga dapat menjamin keinginan individu sehingga individu menjadi ketergantungan karena adanya sebuah lembaga tersebut. Kaerena pembentukan setiap organisasi di bentuk oleh umat nya sendiri, fungsi Negara disini hanya untuk pembinaan yang dilakukan oleh setiap organisasinya sesuai aturan yang diterapkan oleh pancasila (Syamsul,).

Aksi bela Islam 212 terjadi berdasarkan demokrasi masyarakat terkait permasalahan makna surat al-maidah ayat 51. Aksi tersebut telah memunculkan semangat kelompok Islam untuk membenarkan apa yang salah dan menetapkan kesalahan dengan bentuk keadilan. Sistem demokrasi telah menyatukan kelompok Islam yang semata-mata mereka ingin ikut berpartisipasi atas pelecehan ayat. Karena pimpinan dari tokoh agama yang mewawarkan ideologi kepada masyarakat, mau tidak mau masyarakat harus mendukung apa maksud tujuan yang diberikan oleh pimpinan. Itu artinya permainan yang sedang terjadi pada aksi bela Islam bukan saja doktrin dari pimpinan tokoh agama serta partai melainkan dari partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap apa yang terjadi.

Adapun permainan politik yang sedang terjadi di dalam aksi bela Islam sadar tidak sadar kekuasaan dalam partai politik sedang dimainkan. Karena partai politik harus mendapatkan dukungan dan suara masyarakat, dengan ikut campur di dalam aksi bela Islam 212. Permainan yang tidak terlihat oleh masyarakat terkait partai yang ikut bela aksi Islam yaitu pada saat pemilihan gubernur di tahun 2019, calon gubernurnya yaitu Ahok dan Anis Baswedan. Partai yang mendukung dari salah satu calon tersebut seolah-olah sedang merencanakan untuk menjatuhkan dari kesalahan yang terkecil. Akibatnya diantara calon harus mendapatkan sanksi hukum atas kesalahan yang dilakukan.

Tetapi permasalahan di sini entah dari kekuasaan partai atau kekuasaan kelompok agama seperti telah di adu dombakan oleh segelintir orang dibalik layar. Bagaimana tidak yang seharusnya hukuman itu dijatuhkan kepada orang yang menyebarkan video dengan awal mula terjadi perselisihan, hingga akhirnya orang atau obyek yang menyampaikan isi vidiolah (ahok) yang disahkan sebagai orang yang besalah. Jika aturan pemerintahan adil kepada rakyatnya maka kedua subyek tersebut harusnya ikut andil dalam persidangan, tetapi di sini seolah-olah hanya satu pelaku saja yang bersalah. Yaitu orang yang menjelaskan isi makna dari surat al-maidah ayat 51.

Masyarakat awam yang tidak tahu apapun mengenai permasalahan bisa jadi mereka ikut berperan atau berpartisipasi dalam aksi demo tersebut. Akan tetapi kita perlu juga mengetahui makna dari partisipasi yang dilakukan oleh inti politik. Konsep dari partisipasi politik berasal pada anggapan terkait kedaulatan berada ditangan rakyat. Pada dasarnya rakyat memiliki peran penting dalam menentukan kebijakan juga keputusan terkait pemilihan pimpinan melalui sistem pemelihan umum. Karena adanya konsep tersebut maka partisipasi politik telah memberikan legitimasi atas jalannya pemerintahan di dalam setiap negara. Maju dan mundurnya suatu demokrasi pada negara sangat ditentukan oleh partisipasi politik masyarakat. Oleh sebab itu partisipasi oleh masyarakat sangat penting dan mendapat tempat untuk negara indonesia dengan sistem yang demokrasi. Adapun pendapat tentang partisipasi politik dapat terbentuk karena adanya pemogokan massa, aksi masa, demonstrasi bahkan pemberontakan atau teror. Oleh karenanya partisipasi politik bisa dilakukan dalam cara legal maupun ilegal (Ali Taufan, 2020).

Dalam buku memahami ilmu politik yang ditulis oleh Ramlan, partisipasi dibagi menjadi dua macam yaitu secara individu, dengan seseorang menulis kepada pemerintahan atau pengambil kebijakan; kedua partisipasi kolektif, berasal dari gerakan kerumunan masa dengan serentak untuk menyampaikan tuntutan mereka. Adapun macam dari partisipasi kelompok dibagi menjadi dua yaitu konvensional dan non konvensional. Konvensional berdasarkan secara formal melalui Pemilu dan Pilihan Daerah, non-konvensional seperti demonstrasi, pemogokan serta party. Pada umumnya partisipasi ini dilakukan oleh orang oposisi dalam pemerintah dan anti rezim yang berkuasa (Ramli, 1993).

Peran dan fungsi dari suatu kelompok dari partai politik yaitu mewadahi aspirasi masyarakat untuk menjadi penggerak dan suara. Karena adanya aksi bela Islam 212 partai politik dan kelompok Islam beramai-ramai untuk ikut terlibat dalam menegakan suara, agar dapat dukungan dan mendapatkan kursi pemerintahan untuk membentk dan mengembangkan sayap partai maupun organisasi. Seperti halnya ketika aksi tersebut telah bergerak, para perwakilan tokoh Islam mulai mengadakan perundingan tepatnya di kanto Majelis Ulama Indonesia pada 11 Oktober 2016 dengan topik penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok serta polemik lainnya. Singkat saja MUI mengeluarkan putusan dan pendapat responship terkait ucapan Ahok, bahwa; 1. Pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51, melarang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Artinya ayat tersebut melarang beragama non muslim sebagai pemimpin.; 2. Pemilihan pimpinan dari agama Islam diputuskan wajib; 3. Orang Islam wajib meyakini kebenaran isi dalam surat Al-Maidah ayat 51 menjadi pedoman pemilihan pimpinan; 4. Apabila kandungan surat al maidah isinya larangan menjadikan Nasrani dan Yahudi sebagai pemimpin adalah suatu kebohongan maka hukumnya haram dan termasuk penistaan terhadap kitab suci; 5. Apabila menyatakan bohong terhadap ulama menyampaikan dalil surat al-Maidah ayat 51 tersebut diartikan sebagai penghinaan terhadap ulama dan umat Islam. Adapun fungsi MUI kepada masyarakat dapat diwawarkan melalui rekomendasi di dalam pemerintahan dengan isinya yaitu; 1) kewajiban pemerintah serta masyarakat untuk menjaga keharmonisan dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; 2) kewajiban pemerintah mencegah setiap penistaan Al-

Qur'an dan agama Islam dengan tidak melakukan perbuatan tersebut. Harus diadili secara putusan; 3) bagi aparat hukum wajib menindak tegas setiap orang yang telah melakukan penistaan terhadap ayat suci Al-Qur'an dan ajaran Islam serta penghinaan kepada ulama dan umat muslim sesuai peraturan undang-undangan yang berlaku; 4) bagi aparat penegak hukum diminta proaktif melakukan keputusan secara tegas, proposional, profesional, cepat dengan memperhatikan rasa keadilan masyarakat, bertujuan masyarakat percaya terhadap hukum indonesia; 5) permintaan kepada masyarakat untuk tetap tenang dan damai, tidak melakukan aksi main hakim sendiri serta menyerahkan penanganan kepada aparat penegak hukum (Sutiadi,)

Ternyata tidak hanya mengeluarkan rekomendasi saja, banyak dari pihak lain pro dan kontra terkait adanya keputusan yang diambil oleh MUI. Din Syamsuddin menanggapi pendapat tersebut derajatnya seperti melebihi suatu fatwa. Namun tidak hanya di situ para tokoh Islam yang dipelopoti oleh Habib Riziq, Natsir, Zaitun Rasmin membentuk sebuah gerakan yaitu GNPF MUI (Gerakan Nasional Pengawal Fatwa). Kemudian diadakan perkumpulan mengatasnama Gerakan fatwa tersebut yang diwakili oleh tokoh Islam dari lintas ormas menyimpulkan bebeapa sikap dan tafsir atas pernyataan yang diucapkan oleh ahok dalam video sehingga menjadi polemik, kesimpulan tersebut yaitu; 1. Menyimpulkan bahwa ahok telah menghina ulama dengan isi seorang ulama suka berbohong; 2. Menyatakan bahwa ahok menistakan Al-Qur'an khususnya surat Al-Maidah ayat 51 dengan membungkus tujuan menimpu umat. Dari pernyataan tersebut tokoh Islam menyerukan umat muslim untuk berkumpul dan menggelar aksi masa demi membela Al-Qur'an, tokoh ulama dan ajaran Agama Islam (Sutiadi,).

SIMPULAN

Mekanisme Dua Wajah Kekuasaan Terhadap Ideologi 212 (Studi Kasus Demokrasi Wajah Partai Pilgub Jakarta Dan Aksi Bela Islam 212) memiliki beberapa point pembahasan yaitu Mekanisme Partai Politik dan Kelompok Islam Indonesia dalam aksi bela Islam 212, Etika Partai dan Kelompok Islam dalam Ideologi Aksi Bela Islam 212 dan terakhir yaitu Peran Dan Fungsi Partai dan Kelompok Agama Islam Terhadap Aksi Bela Islam 212.

Mekanisme Partai Politik dan Kelompok Islam Indonesia dalam aksi bela Islam 212 merupakan mekanisme untuk melakukan demonstrasi tidak semena-mena tetap harus memiliki aturan. Gerakan di lakukan terutama perintah pimpinan Ulama yang lebih besar dan kuat suaranya. Bela Aksi Islam, memunculkan fenomena baru bagi negara indonesia terkait persatuan umat Islam di Indonesia. Menghasilkan ideologi baru bagi ormas-ormas indonesia maupun yang mainstream ataupun yang tidak, ketika sudah melibatkan terkait agama umat muslim berbondong-bondong membela agamanya. Adanya transformasi gerakan karena sebelumnya sudah menempuh pada gerakan parlemen ke gerakan lebih terlembaga sebagai institusi sosial dan perekonomian. Karena adanya demonstran ini banyak peserta masyarakat indonesia yang turut andil dalam aksi

bela Islam 212. Dan kuatnya gerakan sehingga jadi berkembang sampai diadakannya reuni 212.

Etika Partai dan Kelompok Islam dalam Ideologi Aksi Bela Islam 212 yaitu suara yang terlebih dahulu dikendalikan di dalam kelompok agama, setelah itu menyepakati secara bijaksana dan adil untuk menindak lanjuti perilaku tersebut. Etika partai diterapkan terlebih dahulu oleh para ulama agar umat tidak main hakim sendiri. Aksi 212 dapat saja berlangsung ricu tetapi karena kepatuhan umat kepada tokoh ulama sehingga aksi tersebut terasa berkesan dan damai, meskipun ada yang beranggapan ricuh. Etika tersebut dapat dilihat dari penanaman nilai solidaritas ulama-ulama kepada masyarakat tertanam sangat kuat sehingga masyarakat seolah tergiring untuk menunjukkan rasa solodaritas dan motivasi yang tinggi bagi menegakan syariat Islam, yang kemudian Ahok tetap akan dimaafkan sesuai keadilan yang berlaku. Kasus penistaan ahok juga telah memberikan peluang kepada calon pilihan gubernur pada saat itu yaitu Anies Baswedan bersama wakilnya Sandiaga Uno, dan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Sylviana serta partai yang mendukung calon-calon tersebut ikut terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian masuknya etika partai dalam aksi bela Islam yaitu dengan ikut andil secara menyeluruh dalam menyuarakan pembelaan umat muslim. Sehingga partai dapat berangsur-angsur untuk menempati tempat yang diinginkan dalam kursi pemerintahan politik.

Dan terakhir yaitu Peran Dan Fungsi Partai dan Kelompok Agama Islam Terhadap Aksi Bela Islam 212 ialah dari suatu kelompok dari partai politik yaitu mewadahi aspirasi masyarakat untuk menjadi penggerak dan suara. Karena adanya aksi bela Islam 212 partai politik dan kelompok Islam beramai-ramai untuk ikut terlibat dalam menegakan suara, agar dapat dukungan dan mendapatkan kursi pemerintahan untuk membentuk dan mengembangkan sayap partai maupun organisasi. Seperti halnya ketika aksi tersebut telah bergerak, para perwakilan tokoh Islam mulai mengadakan perundingan tepatnya di kanto Majelis Ulama Indonesia pada 11 Oktober 2016 dengan topik penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok serta polemik lainnya. Singkat saja MUI mengeluarkan putusan dan pendapat responship terkait ucapan Ahok, bahwa; 1. Pada Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 51, melarang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Artinya ayat tersebut melarang beragama non muslim sebagai pemimpin.; 2. Pemilihan pimpinan dari agama Islam diputuskan wajib; 3. Orang Islam wajib meyakini kebenaran isi dalam surat Al-Maidah ayat 51 menjadi pedoman pemilihan pimpinan; 4. Apabila kandungan surat al maidah isinya larangan menjadikan Nasrani dan Yahudi sebagai pemimpin adalah suatu kebohongan maka hukumnya haram dan termasuk penistaan terhadap kitab suci; 5. Apabila menyatakan bohong terhadap ulama menyampaikan dalil surat al-Maidah ayat 51 tersebut diartikan sebagai penghinaan terhadap ulama dan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hamid, Ach. Iqbal Hamdany. "Nilai Sosial Dalam Al-Qur'an (Perspektif M. Quraish Shihab Surah Al-Hujurat Ayat 9-13)." *REVELATIA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, No. 1 (2021): 59-71. <https://doi.org/10.19105/Revelatia.V2i1.4407>.
- Aceng Fuad Hasim Iqbal, Mulawarman Hannase, Abd. Muid. "MORALITAS

- KEMANUSIAAN BERDASARKAN FAKTA SOSIAL ÉMILE DURKHEIM DAN AYAT-AYAT SOSIAL M. QURAIISH SHIHAB." *Jurnal Al Ashriyyah*, Volume 6 No 2 Oktober 2020: 77-94 6, No. 2 (2020).
- An, Dalam Tafsir Al-Qur, Menurut M Quraish Shihab, Andi Rosa, And Andi Rosa. "ORIENTASI KAJIAN ILMU SOSIAL Pendahuluan Agama Termasuk Ke Dalam Kajian Bahasa Agama , 1 Dan Dalam Konteks Islam" 08, No. 02 (2014): 317-42.
- Anggara, Sahya. "Buku Sistem Politik Indonesia." *Sistem Politik Indonesia*, 2015.
- Argenti, Gili. "Islam Politik Di Indonesia: Transformasi Gerakan Sosial Aksi Bela Islam 212 Dari Gerakan Demonstrasi Ke Gerakan Kelembagaan Sosial, Politik Dan Ekonomi." *Jurnal Politikom Indonesiana* 4, No. 2 (2019): 1-23. <https://doi.org/10.35706/Jpi.V4i2.3228>.
- DS, Ali Thaufan, And Dedi Sutiadi. "Partisipasi Politik Umat Islam Dalam Aksi Massa 212 Dan Implikasinya Terhadap Wajah Islam Indonesia." *Ilmu Ushuluddin* 7, No. 2 (2020): 127-50. <https://doi.org/10.15408/Iu.V7i2.15424>.
- Kurniawan, Robi Cahyadi. *Etika Politik & Pemerintahan*, 2021.
- Muhammaddiah, Muhammad Rusdi. "Etika Qurani Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Quraish Shihab." *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 9, No. 1 (2022): 1-14. <https://doi.org/10.32505/Politica.V9i1.3967>.
- Mujahidin, Anwar. "KONSEP HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA Studi Atas Tafsir Al-Misbâh Karya M. Quraish Shihab." *Dialogia* 10, No. 2 (2012): 169-84. <http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/view/309>.
- Nurdin, Roswati. "Manusia Dalam Sorotan Al-Qur'an (Suatu Tinjauan Tafsir Maudhui)." *Tahkim* IX, No. 1 (2013): 155-71.
- Pals, Daniel L. *Seven Theories Of Religion*. Cetakan II. Jogjakarta: Ircisod, 2012.
- Pamungkas, Nabil Lintang, Universitas Gadjah Mada, Agung Widiyantoro, Universitas Gadjah Mada, And Moddie Alvianto Wicaksono. "Relasi Politik Dan Isu Agama : Dinamika Politik PKS Dan Aksi Bela Islam Pada Pemilu Serentak 2019 Relasi Politik Dan Isu Agama : Dinamika Politik PKS Dan Aksi Bela Islam Pada." *Jurnal Sosial Politik* Vol 6 No 1, No. June (2020): 70-84. <https://doi.org/10.22219/Sospol.V6i1.11155>.
- Ramli. "Mannheim Membaca Tafsir Quraish Shihab Dan Bahtiar Nasir Tentang Auliya' Surah Al-Maidah Ayat 51." *Refleksi* 18, No. 1 (2018): 91-114.
- Ramli Subakti. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widia Sarana Indonesia, 1992.
- Runi, Runi, H. "Etika Politik Dalam Negara Demokrasi." *Demokrasi* No 1 (2003): 57-68.
- Sauki, M. "Diskursus Wacana Keagamaan Pasca Aksi 212 Di Indonesia." *Eduprof: Islamic Education Journal* 2, No. 1 (2020): 54-75. <https://doi.org/10.47453/Eduprof.V2i1.31>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Cetakan 27. Bandung: Alfabeta, 2017.
- — —. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Cetakan Ke. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Taryudi, Taryudi, And Tatan Setiawan. "Tafsir Dan Politik Kekuasaan Di Indonesia." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, No. 1 (2021): 63-70.
- Wahid, Masykur. *Teori Interpretasi Paul Ricoeur*. Lkis Yogyakarta, 2015.